PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Rianto¹, Hendri Jayadi², Paltiada Saragi³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Bankruptcy is a general confiscation of all assets of a bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by the curator under the supervision of a supervisory judge, (Article 1 paragraph 1 of Law No. 37 of 2004) Bankruptcy regulations are made and issued because the assets of the debtor are not sufficient to be distributed to creditors as a result of the seizure of bankruptcy assets. With the aim that to protect creditors from obtaining their rights in bankruptcy, to provide opportunities for debtors and creditors to negotiate and make mutual agreements or even provide protection to creditors and debtors for errors or omissions from the curator in the bankruptcy estate. The purpose and objective of writing this thesis is to find out the responsibilities of a curator who made mistakes or omissions in the management and settlement of bankrupt assets and also to find out the extent of legal protection for debtors and creditors against actions taken by the curator. The research method used is a normative juridical research with a statutory approach and uses a decision study where the author analyzes the position of debtors and or creditors who file a bankruptcy application and have legal standing as an applicant for bankruptcy to companies, both private and state-owned companies.*

Keywords: *Accountability of the Curator, Errors or Omissions of the Curator, Legal Protection of Debtors and Creditors, Bankruptcy, Embezzlement.*

How to Site: Rianto, Hendri Jayadi, Paltiada Saragi (2022). Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Penggelapan Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 269-283. DOI.10.55809

Introduction

Tindak pidana pada masa sekarang telah meluas bukan hanya semata-mata dalam hukum pidana saja melainkan telah merambah ke ranah hukum lainnya seperti perdata, administrasi dan internasional, salah satunya merambah ke hukum kepailitan. Mengenai kepailitan di Indonesia saat ini berlaku undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) untuk selanjutnya disebut undang-undang kepailitan. Kepailitan adalah suatu sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawa pengawasan hakim pengawas, (pasal 1 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004) Peraturan kepailitan dibuat dan dikeluarkan karena harta dari debitor tidak mencukupi untuk dibagikan kepada kreditor akibat terjadinya perebutan harta pailit.

Maka, dalam peraturan kepailitan mengatur mengenai kreditor yang didahulukan pembayarannya atau urutan kreditor prioritas.¹

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor, debitor pailit tersebut. Hal yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta debitor pailit. Siapa yang akan mengurus pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor berdasarkan hak-hak masing-masing yang menjadi permasalahan utama dalam kepailitan sebagaimana diungkapkan Profesor warreng adalah siapa yang berhak dan bagaimana membagi harta debitor pailit. Terhadap pernyataan ini, di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator. Hanya saja inti pernyataan ini adalah bagaimana membagi harta debitor pailit. Membagi harta debitor pailit merupakan bagian akhir dari proses kepailitan.

Tahap mencapai pembagian harta inilah yang akan menjadi tugas berat seorang kurator. Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit sendiri Tentang Kurator dari Undang-Undang Kepailitan secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab dari kurator. Pasal-pasal tersebut mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas serta tanggung jawab kurator. Untuk memahami lebih lanjut tugas dan kewenangan seorang kurator, harus terlebih dahulu memahami hakikat dan ruang lingkup tugas kurator. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan berdasarkan undang-undang yaitu:

1. kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atau pihak lain, dan
2. kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain dalam hal ini Hakim pengawas.

Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang kurator karena dalam praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit atau seringkali kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai guna melakukan penelitian terhadap laporan keuangan debitor pailit sehingga boedel pailit pun menjadi tidak maksimal. Dalam beberapa perkara, kurator bahkan memberi kesan yang berseberangan dengan para kreditor dan cenderung berpihak pada debitor. Hal ini mengakibatkan boedel pailit menjadi tidak maksimal dan tidak menguntungkan bagi para kreditor.

¹ Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51

Dalam melakukan pengurusan serta pemberesan harta pailit kurator harus bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan :

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya, Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena apabila ada perbuatan Kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi Kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, pasal 77 ayat 1 UU Kepailitan telah memberikan instrumen perlawanan bagi kreditor dan debitor terhadap kebijakan kurator yang menyatakan setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit² dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas atas perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditor dan debitor pailit. Pasal 372 KUHP yang merupakan pasal tentang penggelapan, siapapun dilarang melakukan perbuatan atau Tindakan menggelapkan barang milik orang lain baik seluruh atau Sebagian.³ atau pengertian lain bahwa Penggelapan merupakan penyelewengan, korupsi, proses, cara atau perbuatan menggelapkan. Menurut Cleiren inti delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Barangsiapa dengan sengaja secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.⁴

² Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 151.

³ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.

⁴ Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm. 349.

Kurator bersumber pada UU No. 37 Tahun 2004 diberi tugas serta tanggungjawab melaksanakan pengurusan serta pemberesan harta pailit. Pengurusan serta pemberesan dilaksanakan Kurator secara independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor, serta tidak lagi menanggulangi masalah kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga kasus kepailitan. Pelanggaran atas syarat inilah yang diancam dengan sanksi, baik pidana ataupun perdata. Pada saat Kurator dalam perihal ini digugat oleh debitor ataupun kreditor dalam melakukan pemberesan harta pailit dimungkinkan terdapatnya permasalahan ketidak independenan dari Kurator dalam melakukan tugasnya, terpaut siapa yang mengajukan penunjukan Kurator tersebut, maksudnya gugatan yang diajukan oleh debitor maupun kreditor disebabkan oleh ketidakpercayaan debitor terhadap proses pemberesan harta pailit yang dicoba oleh Kurator yang ditunjuk oleh salah satu pihak. Kasus tersebut di atas menunjukkan kalau peran Kurator dalam melakukan tugas serta kewenangannya butuh dipertanyakan. Perihal ini berkaitan dengan tanggung jawab Kurator sepanjang melakukan tugasnya apakah cocok dengan peran, semacam yang diartikan dalam syarat UU No. 37 Tahun 2004 serta Kode Etik Profesi Kurator, yang mewajibkan supaya menjunjung independensi, integritas serta objektivitasnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah. Pertama mengenai perlindungan hukum kreditor dan debitor terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kemudian, mengenai analisis hukum atas pertanggungjawaban pidana kurator yang melakukan penggelapan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit (Studi Putusan No.275/Pid/2018/PT.DKI). Hal ini tentu bukan hanya untuk mengedepankan masalah hukum, tetapi juga untuk memperkuat integritas dan objektivitas seorang kurator.

Untuk menganalisis permasalahan sebelumnya, maka digunakanlah teori hukum sebagai dasar analisis. Teori pertama yang digunakan adalah teori perlindungan hukum yang menurut Satjipto Rahardjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁵ Kemudian, teori pertanggungjawaban yang menurut Abdulkadir Muhamad dibagi tiga yakni *international tort liability*, *negligence tort liability*, *strict liability*.⁶

⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53-54.

⁶ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1989, *Kamus Hukum*, Prandya Paramita, Jakarta, hlm. 20.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data diperoleh melalui kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Discussion

Debitor dan Kreditor Dalam Kepailitan

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis⁷.

Sistem hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan secara substantif antara kepailitan atas subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) dengan kepailitan atas subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, debitor dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah:

- Orang atau badan pribadi, yaitu seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitasnya telah diperuntukan untuk membayar hutang-hutangnya.
- Debitor yang telah menikah, yaitu permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta.
- Badan-badan hukum, seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, dan perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya yayasan. Mengenai tanggung jawab pengurus perseroan dalam.
- Harta warisan, Berdasarkan ketentuan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

1. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas;
2. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Tujuan Undang-undang Kepailitan modern adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya sesuai asas yang menjamin hak-hak kreditor dengan kekayaan debitor, yaitu pari passu pro rata parte. Untuk itulah dilakukan sita umum setelah putusan pernyataan pailit terhadap debitor atau disebut juga eksekusi kolektif. Suatu eksekusi kolektif dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Sitaan umum bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Perlindungan terhadap kreditor lainnya dalam Undang-undang Kepailitan adalah adanya ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh debitor, sebaliknya terdapat pula ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor⁸.

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, dalam hukum kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran yang pada pokoknya berisi kemudahan pengajuan permohonan pailit kepada pengadilan niaga terhadap debitor, mengajukan permohonan sita jaminan oleh kreditor ataupun menunjuk kurator sementara untuk mengelola atas sebagian atau seluruh kekayaan debitor, sebagai upaya pengamanan yang bersifat preventif dan sementara, yakni untuk mencegah kemungkinan bagi debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.

Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam kepailitan kreditor dan debitor haruslah diperlakukan secara adil. Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila tidak membayar utang-utangnya. Undang-undang Kepailitan diharapkan mampu membantu kreditor untuk memperoleh akses atas hak-haknya yaitu harta

⁸ Siti Anisah, 2009, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. 16, hlm. 33.

kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Akan tetapi kreditor dan para stakeholders-nya tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor dan para stakeholders dari debitor yang bersangkutan. Oleh karena itu suatu Undang- undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas keseimbangan yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak dalam perkara kepailitan yaitu debitor maupun kreditor⁹

Pengadilan Mengabulkan Permohonan Pailit Untuk Melindungi Debitor

Permohonan pernyataan pailit secara sukarela yang diajukan oleh debitor dapat dibenarkan oleh Undang-undang Kepailitan kita pada saat ini. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitor ini dimaksudkan untuk melindungi debitor yang memiliki utang jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki lebih dari dua kreditor.¹⁰ Dalam prakteknya debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit dikarenakan beberapa alasan yaitu:¹¹

- a. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk mencari perlindungan melalui mekanisme kepailitan, karena aset-aset yang dimilikinya dikuasai oleh para kreditor.
- b. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit dikarenakan alasan kreditor telah melakukan tindakan sepihak kepada debitor untuk memperoleh pembayaran utang-utang debitor kepada kreditor.
- c. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan agar penyelesaian utang-utangnya terhadap para kreditor terjamin dan adil, karena debitor sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan utang-utangnya.
- d. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai upaya untuk menyelamatkan perusahaan, karena keadaan keuangan debitor tidak lagi mampu untuk membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo.
- e. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena yang telah dilakukan oleh perusahaan ternyata tidak membantu debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap para kreditornya. Berdasarkan RUPS diputuskan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.
- f. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena debitor yakin hal ini adalah paling adil untuk semua pihak dalam menyelesaikan utang-utangnya. Adanya pernyataan pailit, berarti pembayaran utang-utangnya dapat dilakukan dengan tertib secara seimbang oleh kurator independen yang diawasi oleh hakim pengawas.

⁹ Sutan Remi Sjahdeini, Op. Cit, hlm. 34

¹⁰ Siti Anisah, Op. Cit, hlm. 346

¹¹ *Ibid.*, hlm. 347.

- g. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit karena mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak lagi melanjutkan usahanya dan untuk menanggung kebutuhan intern perusahaan maupun untuk membayar utang kepada semua kreditor.
- h. Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan usahanya terus mengalami penurunan, dan terdapat perselisihan hukum perpajakan antara debitor dan Ditjen Pajak yang berlarut larut, sehingga menyebabkan debitor tidak sanggup lagi menjalankan bisnisnya.

Perlindungan Kepada Kreditor

Adanya persyaratan concursus creditorium adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau accoord, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh Undang-undang¹². Apabila seorang debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-undang Kepailitan akan kehilangan raison d'être-nya. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor secara otomatis akan menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pari passu pro rata parte, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor¹³.

Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Dalam kepailitan, terdapat lembaga lain yang penting keberadaannya dalam hal ini adalah kurator. Kurator adalah lembaga yang diadakan oleh Undang-undang dengan tujuan melaksanakan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit.¹⁴ Putusan Kepailitan oleh pengadilan niaga bersifat serta merta, yang berarti dapat dilaksanakan atau di eksekusi terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai hukum tetap. Umumnya putusan pengadilan baru dapat dilakukan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, artinya pihak yang bersengketa tidak akan mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi sehingga putusan itu tinggal dieksekusi namun

¹² Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm. 64.

¹³ Jono, Op. Cit., hlm. 5.

¹⁴ Hadi Subhan, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 108.

berbeda dengan putusan pailit yang dasar hukum putusan serta merta kepailitan ini diatur pada pasal 8 ayat 7 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁵

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai batasan kesalahan dan kelalaian yang merugikan sehingga mengandung pemaknaan yang sangat luas. Secara tidak langsung kesalahan dan kelalaian oleh kurator adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 KUH Perdata yakni setiap perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut. Kurator pun demikian, apabila ia melakukan perbuatan yang merugikan harta pailit debitur maka ia harus mempertanggungjawabkannya. Sangat disayangkan karena Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan lebih jelas mengenai kesalahan atau kelalaian oleh kurator.

Pertanggungjawaban Pidana Kurator

Jika kurator melakukan tindakan curang yang merugikan harta pailit, maka kurator dapat diberikan sanksi baik secara perdata maupun pidana dan juga sanksi berdasarkan kode etik (administrasi). Kurator merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses hukum kepailitan dan PKPU. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Penunjukan kurator sementara dapat dilakukan selama putusan pernyataan pailit belum diucapkan atas dasar permohonan setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dengan tugas untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunaan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator (Pasal 10 ayat (1) huruf b UU 37 Tahun 2004). Sementara itu, mengacu pada Pasal 69 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

¹⁵ Larasati, A. A. N, 2013, "Tinjauan Yuridis Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorad*) dan Provisionil Terhadap Putusan Pailit Yang Bersifat Serta Merta", Kertha Semaya, hlm. 4.

Dalam hal penjualan aset pailit (baik secara lelang maupun bawah tangan) diduga dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum atau “curang” yang menguntungkan diri kurator sendiri, maka hukum mengatur bahwa tindakan tersebut dapat diberikan sanksi, secara perdata maupun pidana dan juga berdasarkan kode etik (administrasi). Untuk diketahui Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 telah mengatur bahwa semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.

Mengenai tuduhan penggelapan, James menerangkan bahwa kurator bekerja di bawah pengawasan Hakim Pengawas, termasuk kewajiban membuat laporan. “Kan dia diawasi oleh Hakim Pengawas, wajib membuat laporan pertanggungjawaban per tiga bulan kepada Hakim Pengawas, menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan,” lanjutnya. Hal ini memang diatur di pasal 74 Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004. Jika ada debitor atau kreditor yang curiga atas tindakan pemberesan oleh kurator, hal tersebut bisa dilaporkan kepada Hakim Pengawas untuk memberikan penilaian. Apalagi berdasarkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2016 (SEMA Efisiensi Perkara Kepailitan), Hakim Pengawas punya wewenang memanggil dan meminta penjelasan kurator, memberi teguran kepada kurator, bahkan mengusulkan penggantian kurator kepada majelis hakim niaga. Bagi seluruh kurator, James mengingatkan agar jangan mengambil langkah yang tidak diyakininya. Kurator bisa berkonsultasi dengan hakim pengawas atau para kurator senior dalam membereskan harta pailit. Sejauh para kurator bekerja sesuai prosedur yang telah ditentukan, tidak ada ancaman pidana yang perlu dicemaskan oleh para kurator.

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/Pid/2018

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Mei 2018 Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim;

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Juni 2018 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 9 Agustus 2018 Nomor

883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim, Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari, sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor W10.U5/5937/Hk.01/VII/2018 dan Nomor W10.U5/593Hk.01/VII/2018;

Pada pengadilan tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Mei 2018 dan waktu saat Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Mei 2018 serta mencermati pada formalitas mengenai pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang,

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutus jauh melebihi dari tuntutan Penuntut Umum, yaitu hukuman penjara selama dua tahun (tuntutan JPU ada 9 bulan penjara);

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Mei 2018, memori banding dari Penuntut Umum dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan yang berlanjut dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding seharusnya Para Terdakwa selaku Kurator menjaga kepercayaan terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan menjaga harta kekayaan krediturnya, bukan malahan Para Terdakwa merugikan krediturnya dan juga para Terdakwa telah menikmati hasil

perbuatannya; bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa adalah Perbuatan para Terdakwa mencederai tugas dan fungsi seorang Kurator yang semestinya bisa melindungi hak-hak para Kreditor dalam Kepailitan, Perbuatan para Terdakwa meresahkan para Kreditor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam Pailit dan Para Terdakwa tidak merasa bersalah sedangkan hal-hal yang meringankan adalah Para Terdakwa sopan di persidangan, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan..Pengadilan..Negeri Jakarta Timur Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt. Tim tanggal 15 Mei 2018 haruslah dirubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa RAYMOND BONGGARD PARDEDE, terdakwa LUKMAN SEMBADA dan terdakwa GINDO HUTAHAEAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan dan bersama-sama melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Dokumen Asli berupa Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No: 408K/ Pdt.Sus.Pailit/2015 Jo No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.P st Jo No: 27/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst, tanggal 12 Juni 2017;
 - 1 (satu) Dokumen hasil print berupa Informasi Perkara Mahkamah Agung RI, No: 606 K/ Pdt. Sus-Pailit/2017, tanggal 14 Juni 2017, dengan Pemohon TUKIRAN dan TERMOHON RAYMOND B. PARDEDE, SE., SH, LUKMAN SEMBADA, SE., SH., AAIK, GINDO HUTAHEAN, S.H.,

- 1 (satu) bundel berkas asli yang berisi daftar 12 (dua belas) perkara yang ditangani oleh Madyo Sidharta dan Rekan, yang terdiri dari Proposal-proposal penawaran jasa hukum, Invoice-invoice, dan kwitansi-kwitansi pembayaran. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Dalam putusan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa apabila seorang kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit melakukan kecurangan atau melakukan tindakan yang melawan hukum dalam hal ini menggelapan harta pailit, maka pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan dapat melakukan suatu upaya hukum atas tindakan kurator yang melakukan kecurangan dalam pengurusan harta pailit, sehingga berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Agung penulis menyimpulkan bahwa seorang kurator telah terbukti melakukan kesalahan atau lalai dalam hal ini kurator tersebut telah melakukan menggelapkan atas dasar pasal 372 dan pasal 374 KUHP harta pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebesar Rp.19.812.961.005,- (sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima rupiah) sehingga mereka dikenakan sanksi dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas perbuatan atau tindakan yang mereka lakukan.

Conclusion

Perlindungan berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, pemeliharaan dan membentengi, sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Sehingga penjelasan diatas memberikan suatu pencerahan bahwa dalam suatu kepailitan ada pihak-pihak yang harus dilindungi setiap hak dan kepentingan mereka seperti debitor dan kreditor dari pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga apa yang menjadi tujuan dari kepailitan dapat tercapai dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit,

Tugas serta wewenang kurator secara garis besar, melakukan pengurusan yang antara lain membuat data, melaksanakan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, mendata, melaksanakan riset asset debitor pailit tercantum tagihan-tagihan yang dipunyai debitor pailit. atau dengan kata lain bahwa kurator melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta (boedel) pailit.kurator dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit memiliki suatu tantangan yang sangat berat dimana harus bisa menyelamatkan atau mengelolah harta pailit untuk dapat dibagikan kesetiap kreditor yang terlibat tetapi jika dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator menyalagunakan harta pailit untuk kepentingan pribadi maka dapat

dimintakan suatu pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 72 UU No.37 Tahun 2004 yaitu kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang merugikan harta pailit. Sebagaimana penulis mengambil suatu (Studi Putusan No.275/Pid/2018/PT.DKI) dimana tiga kurator tersebut melakukan suatu tindakan yang menyalagunakan harta pailit demi untuk kepentingan pribadi dalam hal ini tindakan mereka dikenakan (Pasal 372 Jo 374 KUHP) yaitu penggelapan biasa dan penggelapan yang menggunakan jabatan sehingga putusan kasasi dalam kasus tersebut ke 3 (tiga) kurator atau terdakwa tersebut dikenakan sanksi dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas perbuatan atau tindakan yang mereka lakukan.

References

- Anisah, Siti, 2009, Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan, Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. 16.
- Anisah, Siti, 2009, "Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan", Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. 16.
- Ginting, Elyta Ras, 2019, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Larasati, A. A. N, 2013, "Tinjauan Yuridis Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorad) dan Provisionil Terhadap Putusan Pailit Yang Bersifat Serta Merta", Kertha Semaya.
- Purwoleksono, Didik Endro, 2014, Hukum Pidana, Airlangga University PrVoorad) dan Provisionil Terhadap Putusan Pailit Yang Bersifat Serta Merta", Kertha0, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2012, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, 1989, Kamus Hukum, Prandy Paramita, Jakarta.
- Subhan, Hadi, 2009, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.